

# WARTA

## Rapat Dengar Pendapat DPRD Kalteng, Penegakan Hukum Penggunaan Jalan Ditegakan

Indra Gunawan,S.Sos - [PULANGPISAU.WARTA.CO.ID](mailto:PULANGPISAU.WARTA.CO.ID)

Aug 23, 2022 - 23:31



*Gambar: Kondisi Ruas Jalan Palangka Raya - Kuala Kurun Beberapa Waktu lalu dengan kondisi rusak oleh angkuta PBS*

PALANGKA RAYA - Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait penggunaan ruas jalan Kuala Kurun - Palangka Raya, oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS), baik yang ada beraktivitas produksi di wilayah Kab Gunung Mas (Gumas) dan wilayah sekitar, menjadi agenda DPRD Kalimantan Tengah.

DPRD Kalteng, mengundang sejumlah Forkompinda dan perwakilan masyarakat Gumas, di wakikan oleh Aliansi Masyarakat Gumas, melaksanakan Rapat Dengar pendapat, untuk menindaklanjuti permasalahan selama ini.

Pada pertemuan tersebut, disepakati beberapa poin - poin untuk ditindak lanjuti kedepannya, terutama bagi para PBS yang melewati ruas jalan itu.

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. S. Parman Nomor. 2 Telp. 0536-3236320 Fax. 0536-3236329 Palangka Raya 73112

## KESIMPULAN RAPAT

1. Pengetatan Penggunaan Ruas Jalan Kuala Kurun – Palangka Raya sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Konsersium yang melibatkan Pemerintah Provinsi (Dinas teknis), Pemkab Gunung Mas, Aliansi Masyarakat Gunung Mas dan Pemkab Kapuas, Pemkab Pulang Pisau.
3. Penegakan Hukum dalam penggunaan jalan terkait tonase, jenis angkutan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perda 7 Tahun 2012 dan peraturan perundangan.
4. Perlu jalan alternatif/ koridor alternatif angkutan kegiatan perusahaan
5. Mendesak izin jalan koridor ke pemerintah pusat yang diperjuangkan secara bersama-sama baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, DPRD Prov, Kab
6. Selama perbaikan jalan perlu pengetatan aktivitas angkutan perusahaan sesuai ketentuan perundangan
7. Usulan jembatan timbang akan dibahas pada tahun anggaran 2023
8. Perlu tim untuk pembangunan percepatan jalan koridor khusus.
9. Perusahaan wajib melakukan pengawasan terhadap beban tonasi angkutan sejak keluar dari perusahaan.

KETUA DPRD PROVINSI KALTENG :

POLDA KALIMANTAN TENGAH :

KAPOLRES GUNUNG MAS :

PEMDA GUNUNG MAS :

DPRD GUNUNG MAS :

KETUA ALIANSI :

23/8  
2022

Wijulian

23/8 '22

27/8 '22

RICHARD FL. 23/8 '22

Ventury Bangas

23/8 '22

"Selama saya mengikuti RDP tersebut, ada progres yang menunjukkan sesuai dengan harapan, nah.. ini ada suatu kepastian penegakan hukum di kesimpulan rapat," kata Yepta, koordinator Aliansi Masyarakat Gunung Mas.

Selain itu juga katanya, akan segera dibentuk tim percepatan jalan koridor, untuk PBS yang beroperasi di wilayah Kabupaten sekitarnya. Tentunya apa yang dibahas di DPRD Kalteng tadi siang, terkait ruas jalan Palangka Raya - Kuala Kurun, sangat diharapkan masyarakat khususnya, masyarakat Gumas.

Jalan yang merupakan urat nadi masyarakat dalam beraktivitas, khususnya masyarakat Gumas, terganggu akibat aktivitas beberapa PBS, khususnya angkutan batu bara, kayu dan kelapa sawit (CPO).

Baik melalui dana konsorsium dan dana APBD I Kalimantan Tengah, jalan tersebut selalu rusak kembali akibat dilalui oleh angkutan yang melebihi Tonase, sesuai Perda 7 Tahun 2012 Kalteng dan peraturan perundangan.

"Pembahasan utama menekan agar pihak PBS membuat jalan koridor sendiri dalam angkutan hasil produksinya dan penegakan hukum terkait penggunaan jalan serta tonase sesuai aturan hukum yang ada," terangnya.

Poin poin yang dihasilkan dalam RDP oleh DPRD Kalteng, ada 9 (Sembilan) poin, yaitu. Pengetatan penggunaan jalan ruas Palangka Raya - Kuala Kurun sesuai peraturan yang ada, evaluasi pelaksanaan kegiatan Konsersium, penegakan hukum terkait penggunaan jalan terkait tonase, perlu jalan alternatif/koridor alternatif.

Mendesak izin jalan koridor ke Pemerintah pusat, melakukan pengetatan selama perbaikan jalan, usulan pembangunan jembatan timbang yang akan dibahas tahun anggaran 2023, perlu tim khusus dalam pembangunan jalan koridor, dan perusahaan wajib melakukan pengawasan dalam angkutan tonase.

Dalam RDP itu, dihadiri dan disepakati semua yang hadir, terdiri dari, Ketua DPRD Kalteng, Polda Kalteng, Kapolres Gunung Mas, Pemda Gunung Mas, DPRD Kab Gunung Mas dan Ketua Aliansi Masyarakat Gunung Mas.

"Dengan di fasilitasi oleh DPRD Gunung Mas, DPRD Kalteng, terutama pihak - pihak PBS, artinya kita sama - sama mengawasinya," tutup Yepta.